

**Upaya Keluarga BMPI (Buruh Migran Perempuan Indonesia) dalam Menjaga  
Integrasi Keluarga di Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**

**Ari Maya Sopa  
NIM. 105120100111033**

**ABSTRAK**

Desa Watulimo merupakan salah satu kantong BMPI di Kabupaten Trenggalek. Secara umum keluarga BMPI berisiko mengalami perceraian. Bersamaan dengan hal itu Desa Watulimo memiliki kontrol sosial untuk menjaga integrasi keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya keluarga BMPI dalam menjaga integrasi keluarga. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data kemudian dianalisis menggunakan *voluntaristic theory of action* dan teori sistem Parsons.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi keluarga BMPI yang berisiko disfungsi dapat diminimalisir oleh upaya ayah. Misalnya upaya dalam menggantikan peran domestik ibu. Ketika ibu menjadi BMPI, ayah adalah bagian inti dalam keluarga.

Keluarga BMPI dalam menjaga integrasi keluarga diatur seperangkat nilai dan norma, khususnya yang menyangkut keluarga dan perceraian. Hal itu merupakan manifestasi bekerjanya syarat fungsi sistem keluarga *latent pattern-maintenance*, kemudian mempengaruhi syarat fungsi sistem yang lain yakni: *goal*, *integration* dan *adaptation*. Bekerjanya syarat fungsi sistem secara interdependensi, menopang sub sistem keluarga dalam menjaga integrasi keluarga.

**Kata Kunci:** keluarga, sistem keluarga, risiko perceraian, integrasi

## **ABSTRACT**

Watulimo village is one of Indonesian Female Migrant Worker sources in Trenggalek. In general, the workers families are more vulnerable to divorce. Besides that Watulimo village retains its social control to keep family integration.

The aim of the research is to discover effort of female migrant worker to keep the family integrated. This research used qualitative method and case study approach, furthermore the data was analyzed by voluntaristic theory of action and Parsons system theory.

This research showed that disfunction of the family left by mother are minimized by the efforts of the fathers, such as efforts to replacing mothers's domestic roles. When the mothers migrate, the fathers become the main part in the family.

The family of Female Migrant Worker when keep their family integration controled by values and norms, especially those which were related to family and divorce. That condition explicitly became the manifestations of terms of functional family system as a latent pattern-maintenance. The terms of functional system, furthermore, influence another terms of functional system such as goal, integration and adaptation. In connecting with interdependency, the operation of the terms of functional system could support to keep the family integration.

**Keywords:** family, family system, divorce vulnerability, integration

## **A. Risiko Perceraian Keluarga BMPI.**

BMPI (Buruh Migran Perempuan Indonesia) secara mayoritas bekerja pada sektor domestik. Mereka memperoleh remitansi yang dapat meningkatkan status sosial, ekonomi bahkan posisi tawar di hadapan suami. Namun bersamaan dengan hal itu muncul permasalahan internal keluarga dan mengarah pada perceraian.

Permasalahan internal keluarga BMPI di antaranya ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian. Misalnya di Kecamatan Rawamarta Kabupaten Karawang Jawa Barat menunjukkan bahwa “kebutuhan biologis suami yang tidak terpenuhi menjadi faktor utama munculnya problematika keluarga hingga berakhir pada perceraian” (Dulay, 2001, hlm. 96-100). Penelitian Yunitasari (2012) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa “bekerjanya istri sebagai BMPI berpengaruh terhadap struktur dan fungsi keluarga kemudian berisiko pada perceraian” (hlm. 5). Penelitian Sofiasta (2010) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa “kebutuhan seksualitas yang tidak terpenuhi merupakan faktor utama tingginya angka perceraian” .

Beberapa penelitian di atas memberikan dasar informasi bahwa ketika istri menjadi BMPI maka mempengaruhi struktur keluarga yang ditinggalkan. Berubahnya struktur keluarga berdampak pada fungsi-fungsi keluarga kemudian memunculkan problematika keluarga. Selain itu perubahan struktur keluarga juga berdampak pada pergeseran peran gender antara suami dan istri. Minimnya komitmen dalam menjalankan peran baru masing-masing dan tidak ada upaya positif dalam menghadapi problematika keluarga maka akan semakin mendorong pada perceraian.

Secara teoritis menghindari perceraian dan menjaga keutuhan keluarga berarti menjaga fungsi keluarga yang penting dan mendasar bagi anggota keluarga terlebih bagi anak. Coser dalam Goelardi (2004, hlm. 167) menegaskan bahwa “berfungsinya keluarga dengan baik merupakan prasyarat mutlak bagi kelangsungan suatu masyarakat”. Kemudian Prameswari (2004, hlm. 67) juga sepakat bahwa “keluarga dalam menjalankan tugasnya, menjadi institusi terkuat yang dimiliki oleh masyarakat (manusia), karena idealnya dari keluarga manusia memperoleh kemanusiaan”. Hal tersebut didukung oleh Mudjijono dkk (1997, hlm. 2) bahwa melalui lembaga keluarga kehidupan seseorang terbentuk. Keluarga diibaratkan menjadi tempat seseorang mengalami proses sosialisasi yakni: memahami, menghayati, merasakan segala aspek kehidupan (kebudayaan). Selanjutnya hasil sosialisasi tersebut digunakan sebagai kerangka acuan di setiap tindakan dalam menghadapi kehidupannya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara normatif lembaga keluarga dinilai penting sehingga perlu dijaga fungsi dan keharmonisannya, namun di duabelas wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur khususnya kantong utama BMPI terdapat fenomena yang bertolak belakang dengan hal tersebut. Pada tahun 2011-2012 angka perceraian BMPI mengalami peningkatan 96,58 persen, dari 439 kasus menjadi 863 kasus (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2012). Adapun fluktuasi angka perceraian di wilayah kantong BMPI sangat beragam. Jumlah BMPI tidak berpengaruh terhadap intensitas perceraian, dalam artian semakin tinggi angka BMPI bukan berarti semakin tinggi pula intensitas perceraian begitupun sebaliknya.

Berkaitan dengan hal di atas Kabupaten Trenggalek pada tahun 2011 merupakan salah satu kantong BMPI dengan jumlah 3.593 jiwa atau 4,11 persen dari total BMPI di Jawa Timur (BNP2TKI, 2012). Pada tahun 2011 angka perceraian keluarga BMPI di kabupaten tersebut sangat rendah yakni 8 kasus atau 1,82 persen dibanding seluruh wilayah kantong BMPI Jawa Timur (Pengadilan Agama Trenggalek, 2011). Kemudian pada tahun 2012 angka tersebut menurun menjadi 4 kasus (angka paling rendah) atau hanya 0,46 persen (Pengadilan Agama Trenggalek, 2012). Hal itu sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Perbandingan angka BMPI di duabelas wilayah kantong BMPI Jawa Timur dengan angka perceraian keluarga BMPI pada tahun 2011-2012.**

No	Nama	Angka BMPI tahun 2011, 2012				Angka perceraian BMPI tahun 2011, 2012			
		Kab/Kota	2011	%	2012	%	2011	%	2012
1	Kab. Malang	13.414	15,37	4.635	15,51	35	7,97	172	19,93
2	Ponorogo	11.561	13,24	4.495	15,04	23	5,24	155	19,6
3	Kab. Blitar	11.369	13,02	4.300	14,39	59	13,44	75	8,69
4	Banyuwangi	9.932	11,38	3.568	11,94	92	20,96	86	9,97
5	Tuluagung	9.282	10,63	1.243	4,16	144	32,80	158	18,31
6	Kab. Madiun	6.739	7,72	2.484	8,31	38	8,66	44	5,10
7	Kab. Kediri	6.130	7,02	2350	7,87	11	2,50	31	3,59
8	Bangkalan	4.532	5,19	1.843	6,17	5	1,14	4	0,46
9	Magetan	3.841	4,40	1.486	4,97	5	1,14	102	11,82
10	Jember	3.942	4,52	1.146	3,84	15	3,42	23	2,67
11	Trenggalek	3.593	4,12	1.218	4,08	8	1,82	4	0,46
12	Ngawi	2.962	3,39	1.111	3,72	4	0,91	9	1,04
Jumlah		87.297	100	29.879	100	439	100	863	100

*Sumber:* BNP2TKI. 2011-2012 (Data Diolah Peneliti), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 2011-2012 (Data Diolah Peneliti)

Rendahnya angka perceraian keluarga BMPI di Kabupaten Trenggalek memunculkan berbagai asumsi yakni: 1) dimungkinkan terdapat nilai-nilai maupun norma yang diinternalisasi keluarga BMPI kemudian “mengatur” keluarga BMPI untuk tetap menjaga integrasi keluarga. 2) dimungkinkan terdapat upaya pasangan suami istri yang serius dalam menghadapi perubahan struktur keluarga, bahkan ketika menghadapi problematika yang berisiko memunculkan perceraian.

BMPI di Kabupaten Trenggalek secara ekonomi mandiri, dimana remitansi perbulan melebihi penghasilan suami. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Hull dalam Dauly (2001, hlm. 12) yang menunjukkan bahwa “di Jogjakarta pada tahun 1976,

istri di desa-desa yang mempunyai penghasilan mandiri mudah meminta cerai kepada suaminya bila terjadi percekcoakan”. Namun hal tersebut tampaknya tidak terjadi di Kabupaten Trenggalek sebagaimana termanifestasi pada rendahnya tingkat perceraian BMPI.

Berkaitan dengan kondisi di atas penelitian mengenai keluarga BMPI hanya sebatas pada masalah-masalah internal. Misalnya pola asuh anak, perubahan fungsi keluarga maupun seputar perceraian. Di samping itu gejala sosial misalnya di Kabupaten Trenggalek dengan tingkat perceraian jauh lebih rendah dibanding dengan wilayah-wilayah lain sama sekali belum “terjamah” oleh penelitian. Padahal hal itu penting untuk diketahui terkait bagaimana mereka dapat *survive*.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa keluarga BMPI di Kabupaten Trenggalek menjadi menarik dan penting untuk dikaji lebih lanjut terutama terkait; bagaimana upaya keluarga BMPI dalam menjaga integrasi keluarga. Guna menjawab rumusan masalah, data penelitian dianalisis menggunakan paradigma fungsionalis. Keluarga dipandang sebagai sistem terdiri dari sub sistem (anggota keluarga) yang cenderung stabil, teratur dan terintegrasi. Hal itu ditopang oleh bekerjanya syarat fungsi sistem keluarga BMPI dengan hubungan interdependensi.

## **B. Landasan Teori**

Pada penelitian ini penulis menggunakan paradigma fungsionalis. Masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, dalam suatu cara yang teratur berdasarkan seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Lebih lanjut masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang (Horton dan Hunt, 1996, hlm. 18). Jadi asumsi dasar dari pendekatan fungsionalis bahwa “seluruh struktur sosial atau setidaknya yang diprioritaskan, menyumbangkan terhadap suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku” (Zeitlin, 1998, hlm. 3).

Pada konteks paradigma fungsional keluarga dipandang sebagai kesatuan sistem yang terintegrasi, terdiri dari subsistem yakni anggota keluarga. Suatu keluarga normatifnya bersifat stabil dan terintegrasi secara fungsional, oleh karenanya setiap subsistem atau anggota keluarga memiliki kecenderungan berusaha konsisten menjalankan sistem dan fungsi-fungsi keluarga.

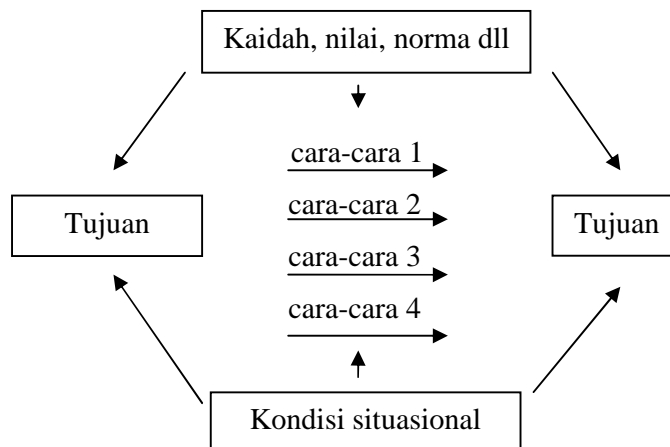
Melalui paradigma fungsionalis penulis menggunakan landasan teori *voluntaristic theory of action* dan teori sistem Parsons. *Voluntaristic theory of action* menganalisa struktur dan proses, manusia membentuk maksud-maksud yang penuh arti dan melaksanakannya

dalam situasi konkrit (Parsons, 1977 dalam Poloma, 2000, hlm.186). *Voluntaristic theory of action* terdiri dari unsur-unsur dasar sebagai berikut:

1. Pelaku (*actor*) yang merupakan pribadi individual, lembaga maupun organisasi.
2. *Actor* mencari tujuan-tujuan (*goals*) yang akan dicapai.
3. *Actor* mempunyai cara-cara (*means*) untuk mencapai tujuan.
4. *Actor* dihadapkan pada pelbagai kondisi situasional (*situational condition*).
5. *Actor* dikuasai oleh nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah dan gagasan-gagasan lain (*norms, values, other ideas*). Kemudian hal ini mempengaruhi penetapan tujuan dan pemilihan cara untuk mencapai tujuan
6. *Actor* atau tindakan mencangkup pengambilan keputusan secara subyektif oleh *actor* untuk memilih cara mencapai tujuan yang dibatasi oleh berbagai gagasan dan kondisi situasional (Soekanto. 1986, hlm. 26).

Adapun keterkaitan antara unit-unit teori tindakan atau (*Voluntaristic theory of action*) adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. Unit-unit *Voluntaristic theory of action***



*Sumber:* Jonathan H. Turner, 1974, hlm. 32 (dalam Soekanto. 1986, hlm. 28)

Berdasarkan skema di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya yang menjadi poin utama Parsons bukan tindakan individual (*Actor*), namun bagaimana norma dan nilai sosial menuntun dan mengatur tingkah laku. Kondisi obyektif dan struktur disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai untuk perkembangan bentuk sosial tertentu (Poloma, 2000, hlm. 170). Sehingga dapat dikatakan tindakan *actor* dipengaruhi oleh struktur maupun kondisi situasional untuk mencapai tujuan.

Pada teori Parsons terjadi permasalahan struktur dan kondisi obyektif yang mempengaruhi individu. Perkembangan permasalahan tersebut kemudian membawa Parsons pada teori struktural fungsional atau teori sistem. Pada tahap ini pemikiran Parsons didominasi oleh analogi suatu organisme hidup yang terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan dan mempengaruhi (Poloma, 2000, hlm. 171). Sistem dianalogikan seperti halnya kesatuan organ yang saling mempengaruhi. Konsep-konsep teori tindakan selanjutnya menjadi dasar teori struktural fungsional yang menekankan fungsi sistem sosial. Pada teori struktural fungsional, struktur dan fungsi masyarakat menjadi fokus pemikiran Parsons. Konseptualisasi struktur digunakan untuk melihat sistem yang saling mempengaruhi dan bagian-bagiannya tidak otonom (Poloma, 2000, hlm. 171).

Menurut Parsons sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan. Keteraturan menjadi norma suatu sistem. Jika terjadi kekacauan norma, maka sistem mengadakan penyesuaian dan mencoba kembali ke keadaan normal (Poloma, 2000, hlm. 172). Kepribadian merupakan aspek sistem sosiokultural (Zeitlin, 1998, hlm. 29). Individu menginternalisasikan pola-pola nilai yang dilembagakan dan secara khas menerapkan peranan secara wajar. Di saat mereka tidak melakukan hal itu (menyimpang) maka akan dikembalikan lagi ke dalam “suatu garis” melalui beberapa sanksi negatif.

Pada sistem yang hidup terdapat prasyarat atau *functional imperative*. Menurut Parsons terdapat dua fungsi atau kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelestariannya. Dua pokok tersebut yakni: 1) Kebutuhan sistem internal atau ketika berhubungan dengan lingkungannya (sumbu internal-eksternal). 2) Berhubungan dengan pencapaian tujuan serta sarana untuk mencapai tujuan (sumbu instrumental-consumatory). Kemudian secara deduktif Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional, selanjutnya dirangkai dengan seluruh sistem hidup yakni: 1) *latent pattern-maintenance* (L), merujuk pada bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai beberapa aturan atau norma. 2) *integration* (I), yaitu kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional. *Integration* juga dapat dikatakan merujuk pada masalah koordinasi dan pemeliharaan hubungan-hubungan antara unit-unit sistem. 3) *goal attainment* (G), yakni memprasyaratkan tujuan sistem dan penetapan prioritas di antara tujuan-tujuan. 4) *adaptation* (A), merujuk pada kemampuan sistem menjamin apa yang dibutuhkan ke dalam seluruh sistem, jadi dapat dikatakan juga bahwa adaptasi merupakan upaya pelaku mengambil fasilitas yang cukup dari alam sekeliling dan membaginya melalui sistem (Soekanto, 1986, hlm. 43).

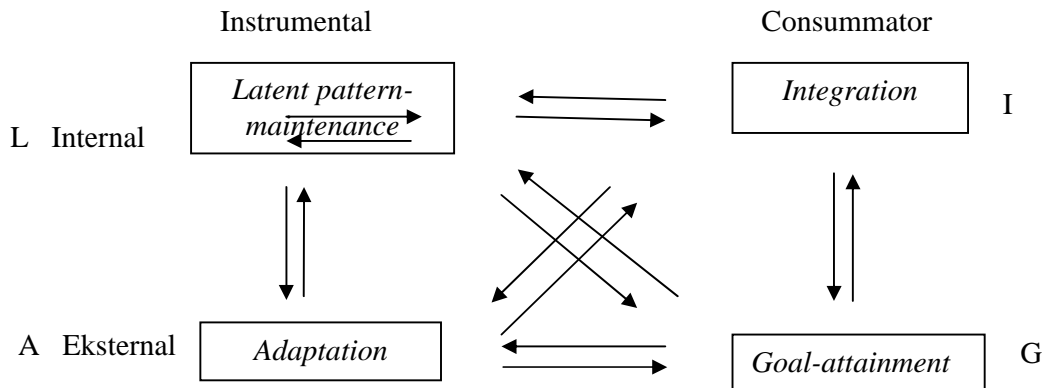
Keempat poin tersebut ditemukan di seluruh sistem (Poloma, 2000: 180-181, Soekanto, 1986, hlm. 43-44). Skema dari empat fungsi di atas tertanam pada setiap sistem



yang hidup pada seluruh tingkat organisasi serta tingkat perkembangan evolusioner, dari yang bersel satu sampai peradaban yang tertinggi (Parsons, 1970 dalam Poloma, 2000 hlm. 181)

Adapun skema dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. Skema keterkaitan antara *Latent pattern-maintenance*, *Integration*, *Goal-attainment* dan *Adaptation***



Sumber: Parsons dan Platt (1972) dalam Poloma (2000 hlm, 182)

Pada konteks penelitian ini, berdasarkan *voluntaristic theory of action* keluarga BMPI merupakan *actor* terdiri dari individu-individu dalam keluarga yang terintegrasi. *Actor* memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai yakni kesejahteraan ekonomi keluarga. Di samping itu *actor* “dituntut” untuk tetap menjaga integrasi keluarga. Selanjutnya ketika *actor* berusaha mencapai tujuan mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma maupun gagasan-gagasan.

Pada penelitian nilai maupun norma bertolak belakang dengan situasi kondisi yang dihadapi oleh keluarga calon BMPI. Secara umum nilai dan norma di Desa Watulimo memberikan “patokan” bahwa suami secara normatif sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri lebih banyak melakukan pekerjaan rumah. Akan tetapi situasi dan kondisi bertolak dengan nilai tersebut. Suami di Desa Watulimo secara umum kurang mampu bertindak sebagai pencari nafkah utama karena masalah peluang kerja. Sebaliknya justru istri yang memiliki peluang kerja dengan hasil yang relatif tinggi.

Keluarga calon BMPI dalam mencapai tujuan memanfaatkan sarana-sarana misalnya peluang kerja di luar negeri. Pada akhirnya nilai dan situasi kondisi tersebut mempengaruhi *actor* dalam menjalankan cara yang telah ia putuskan yakni menjadi BMPI. Dalam hal ini situasi kondisi lebih dominan mempengaruhi individu, sebagaimana pada akhirnya banyak perempuan meninggalkan ranah domestinya untuk menjadi BMPI.

Ketika keluarga BMPI berusaha mencapai tujuan muncul *situational condition* yang selalu berdinamika. Permasalahan keluarga muncul dan mengganggu *actor* mencapai tujuan sekaligus integrasi keluarga. Pada saat *actor* berusaha mencapai tujuan dan berhadapan dengan masalah keluarga, *actor* dipengaruhi oleh norma maupun nilai. Nilai maupun norma tersebut memiliki kecenderungan mempertahankan integrasi keluarga. Sehingga jika terjadi penyimpangan maka nilai dan norma akan mempengaruhi *actor* untuk kembali “ke jalan” yang benar. Jadi pada konteks teori sistem Parsons masalah yang mengancam integrasi keluarga diselesaikan melalui *latent pattern-maintenance*. Berdasarkan serangkaian sistem tersebut integrasi dan tujuan keluarga dapat tercapai.

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yakni “upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti” (Richie dalam Moleong, 2012, hlm. 6). Adapun alasan konkrit penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena secara mendalam penelitian diarahkan untuk mengetahui gejala sosial terwujudnya integrasi keluarga, sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah penelitian. Guna mendukung penelitian tersebut bersifat komprehensif penelitian juga diarahkan untuk meneliti latar belakang subyek penelitian. Menurut penulis kedua pokok penelitian akan sulit dan kurang akurat jika diteliti dengan menggunakan metode kuantitatif.

Kemudian pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteks alamiah tanpa ada intervensi dari pihak luar (Salim, 2006, hlm. 118). “Pendekatan studi kasus cocok apabila pertanyaan penelitian tersebut berkenaan dengan *how* (bagaimana) atau *why* (mengapa)” (Yin, 2012, hlm. 1). Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menjawab ‘bagaimana’, sebagaimana tertuang pada rumusan masalah yakni bagaimana upaya keluarga BMPI dalam menjaga integrasi keluarga.

Penelitian ini dilakukan di Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Adapun alasan pemilihan lokasi diantaranya:

Pertama, sebagian besar yang menjadi buruh migran di Desa Watulimo adalah perempuan ibu rumah tangga. Pada tahun 2011 terdapat 34 perempuan yang tercatat mendaftar sebagai BMPI 27 jiwa atau 79,41 persen berstatus kawin (Kecamatan Watulimo, 2011). Sedangkan pada tahun 2012 terdapat 26 pendaftar, 19 jiwa atau 73,07 persen di antaranya berstatus kawin (Kecamatan Watulimo, 2012). Pada tahun 2013 sampai bulan

Oktober terdapat 26 pendaftar 18 jiwa atau 69,23 persen di antaranya berstatus kawin (Kecamatan Watulimo, 2013).

Kedua, di Desa Watulimo terdapat norma atau aturan tidak tertulis mengenai “kumpul kebo” atau perselingkungan dengan istilah *tangkep*. Selama ini pelanggar *tangkep* selalu dari keluarga yang pihak istri maupun suami sedang bekerja di luar negeri maupun luar wilayah. Adapun mayoritas pelanggar *tangkep* adalah keluarga BMPI. Jadi secara tidak langsung terdapat kontrol sosial secara khusus oleh masyarakat Desa Watulimo untuk menjaga integrasi keluarga BMPI, melalui norma *tangkep*. Adapun denda bagi pelanggar dengan membayar sejumlah sak semen. Unikny penentuan jumlah sak semen tersebut ditentukan sendiri oleh pelanggar tanpa ada paksaan dari pemerintah maupun masyarakat luas. Misalnya pada tahun 2010 pelanggar norma *tangkep* bersedia membayar denda 50 sak semen senilai Rp 3.150.000,-.

Ketiga, meskipun Desa Watulimo merupakan Desa dengan jumlah BMPI tertinggi di Kecamatan Watulimo, namun setelah peneliti melakukan berbagai observasi dan *check* perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek, pada tahun 2011-2012 tidak ada satupun keluarga BMPI yang bercerai. Berbagai data maupun fakta di atas merupakan serangkaian pertimbangan mengapa penelitian ini dilakukan di Desa Watulimo.

Selanjutnya penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2001, hlm. 61). Selain itu dalam menentukan karakteristik informan yang baik, peneliti menggunakan beberapa syarat yang dikemukakan oleh spreadley yaitu; enkulturasi penuh, keterlibatan langsung, cukup waktu dan non analitis

Berdasarkan pemaparan Spreadley di atas selanjutnya dapat direduksi bahwa kriteria informan utama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BMPI purna, maksudnya perempuan yang pernah menjadi BMPI dan sekarang sudah kembali di kampung halaman. Adapun kriteria BMPI yang menjadi informan utama adalah pernah bekerja sebagai BMPI minimal satu kali kontrak atau dua tahun. Ketika menjadi BMPI perempuan tersebut telah menikah dengan kondisi keluarga tidak bercerai hingga penelitian ini berlangsung.
2. Suami BMPI purna yang bersangkutan. Jadi informan utama merupakan pasangan suami-istri BMPI purna.

#### **D. Upaya Keluarga BMPI Menjaga Integrasi Keluarga**

Upaya pasangan suami istri BMPI dalam menjaga integrasi keluarga secara garis besar terdiri dari empat aspek yaitu: 1) Kesiambungan tindakan dalam perubahan pembagian kerja, 2) Kerja sama dalam mencapai tujuan atas keputusan menjadi BMPI, 3) Koordinasi antara suami istri ketika muncul permasalahan, 4) Kesesuaian tindakan suami istri dengan seperangkat nilai dan norma dalam menjaga integrasi keluarga.

#### **E. Analisis Upaya Keluarga BMPI Pada Konteks *Voluntaristic theory of action* dan Teori Sistem Parsons**

Pada masyarakat Desa Watulimo krisis lapangan pekerjaan dalam konteks *voluntaristic theory of action* merepresentasikan kondisi situasional. Hal itu menyebabkan *actor* yakni keluarga inti yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak sulit mencapai *goals*. *Goals* tersebut yakni kesejahteraan ekonomi ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.

*Goals* yang ingin dicapai *actor* telah “dimanipulasi” oleh seperangkat nilai maupun norma. Keluarga secara normatif harus mampu menjamin keberlangsungan kesejahteraan anggota keluarga. Nilai tersebut juga diikuti oleh nilai mengenai pentingnya suatu keluarga, sehingga nilai tersebut selanjutnya menuntun *actor* untuk tetap bersatu sekaligus mencapai *goals*. Pada akhirnya kesejahteraan *actor* tidak dapat tercapai hanya dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, namun kesatuan anggota keluarga inti (ayah, ibu dan anak) dalam kondisi harmonis juga merupakan hal utama.

Untuk mencapai *goals*, *actor* memiliki berbagai cara atau *means* sebagaimana termanifestasi pada mekanisme pembagian kerja keluarga. Cara pertama adalah dengan pembagian kerja, dimana suami sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Dalam hal ini suami memanfaatkan berbagai sarana lapangan kerja di wilayah Desa Watulimo misalnya sebagai petani, buruh *manol*, tukang kayu maupun pembuat *doran*. Akan tetapi dengan cara ini *actor* belum mampu mencapai *goals*. Suami menghadapi krisis lapangan pekerjaan. Bersamaan dengan hal ini *actor* juga dominan dipengaruhi oleh nilai bias gender, sehingga pembagian kerja keluarga masih dominan *sexist*<sup>1</sup>.

Selanjutnya kondisi situasional yang dihadapi oleh *actors* perlahan mengalami dinamika. Istri dihadapkan oleh lapangan kerja dan kesempatan kerja yang luas untuk

---

<sup>1</sup> Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin.

menjadi BMPI. Kondisi situasional tersebut mempengaruhi *actors* untuk memperoleh cara ke dua.

Secara praktik cara ke dua termanifestasi pada pembagian kerja, dimana bukan hanya suami yang aktif sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Implementasi cara ke dua ini diringi dengan semakin melonggarnya nilai bias gender, oleh karenanya pembagian kerja antara suami istri menjadi setara. Cara ke dua muncul atas konsekuensi *actor* (suami-istri) dalam memutuskan dan menyepakati istri menjadi BMPI. Melalui cara ke dua ini *actors* memanfaatkan berbagai sarana peluang kerja untuk menjadi BMPI. Ketika mereka tidak memiliki dana sebagai uang saku untuk menjadi BMPI, mereka memanfaatkan sarana misalnya hutang ke Bank disamping mendapatkan pesangon dari PJTKI.

Pada konteks *voluntaristic theory of action* cara-cara yang ditentukan oleh *actor* dalam mencapai *goals*, merepresentasikan posisi *actor* pada kondisi tertentu masih memiliki kebebasan untuk menentukan cara. Meskipun pada kenyataannya munculnya cara-cara tersebut merupakan hasil kerja dari kondisi situasional maupun nilai dan norma.

Bersamaan dengan kondisi di atas aspek struktur (nilai-nilai maupun norma) pada poin tertentu bersifat fleksibel. Nilai mengenai pembagian kerja suami istri dalam keluarga, tidak secara paten menganut sistem konvensional. Suami istri lebih berpeluang membantu menjalankan peran yang dilakukan oleh pasangan. Jadi ketika suami tidak sepenuhnya mampu membawa keluarga pada kesejahteraan ekonomi, selanjutnya istri memiliki peluang berkontribusi dalam membantu peran suami misalnya dengan menjadi BMPI.

Ketika istri menjadi BMPI situasi kondisi terus berdinamika. Struktur keluarga inti berubah, yang semula terdiri dari ayah, ibu dan anak berkumpul dalam satu rumah menjadi keluarga inti yang tanpa istri bagi suami dan tanpa ibu bagi anak. Perubahan struktur keluarga mempengaruhi fungsi keluarga. Hubungan jarak jauh antara suami istri juga tidak jarang memunculkan masalah keluarga dan risiko perceraian.

Selanjutnya ketika keluarga BMPI dihadapkan oleh risiko perceraian, anggota keluarga melakukan penyesuaian diri. Mereka melakukan berbagai cara untuk menjaga hubungan anggota keluarga tetap harmonis disamping berusaha mencapai *goals*. Upaya tersebut tidak lepas dari nilai maupun norma yang ada dalam masyarakat (nilai mengenai pentingnya keluarga, nilai sakral pernikahan dan perkawinan juga nilai perceraian). Nilai-nilai di atas tidak hanya beroperasi pada tataran abstrak namun juga beroperasi pada tataran konkret. Hal ini termanifestasi pada sanksi negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelanggar nilai maupun norma.

Ketika hubungan harmonis antara suami istri mulai goyah nilai-nilai di atas bekerja. Suami istri selanjutnya “diatur” untuk tetap berusaha melanggengkan pernikahan, menjaga kesatuan keluarga serta menjauhi suatu perceraian. Jadi nilai seolah-olah menuntun tindakan-tindakan suami istri ketika mereka menghadapi kondisi yang berisiko menyebabkan perceraian.

Pada penelitian ini temuan lapang mengenai upaya *actors* (anggota keluarga BMPI) dalam menjaga integrasi keluarga dianalisis menggunakan teori sistem Parsons. Sebelum membahas mengenai upaya tersebut, maka sangat penting untuk mengkaji keluarga dan setting sosial BMPI berdasarkan aspek *pattern variables*. Hal ini dimaksudkan untuk mendefinisikan kategori tindakan atau klasifikasi peranan oleh keluarga BMPI maupun masyarakat sebagai setting sosial. Pada penelitian ini *pattern variables* menjadi sarana penghubung antara analisis *voluntaristic theory of action* dengan teori sistem (*adaptation, goals, integration* dan *lattern pattern maintenance*). *Pattern variables* pada penelitian ini diantaranya:

1. *Affective versus neutrality*.

Pola *affektive* terjadi antara suami istri keluarga BMPI dengan didasarkan atas pemenuhan afeksi, lebih lanjut hal ini dapat mengukuhkan integrasi keluarga BMPI. Pola hubungan ini juga menjadi pembeda pola hubungan antara suami istri BMPI dengan teman atau pihak yang lain. Ketika istri berada di negara tujuan ia membatasi pola hubungan *affektive*, adapun tindakan yang secara umum dominan adalah *neutrality*, bersifat netral tanpa ada orientasi afeksi. Hal ini secara tidak langsung juga menjadi upaya BMPI dalam menjaga integrasi keluarga, konkritnya untuk membatasi munculnya PIL dari pihak istri.

Pola hubungan *affektive* suami BMPI dikontrol oleh seperangkat nilai maupun norma. Misalnya norma tangkep secara restutif berperan menekan munculnya pola hubungan *affektive* antara suami BMPI dengan pihak ke tiga, yang selanjutnya akan mengarah perselingkuhan. Norma tersebut diterapkan oleh masyarakat dengan sanksi sosial dan material bagi suami BMPI maupun pihak ke tiga yang melakukan pola hubungan *affektive* dan mengarah pada perselingkuhan.

Lebih lanjut pola hubungan di atas juga merepresentasikan bagaimana posisi atau peranan *actors* dalam sistem keluarga. Antara suami istri normatifnya memiliki pola khusus yakni *affektive* dalam melakukan tindakan atau hubungan. Pada konteks yang lain mereka juga memiliki batasan-batasan tertentu dalam melakukan tindakan.

## 2. *Self orientation versus collective orientation*

Pada penelitian ini pola tindakan *collective orientation* lebih dominan dari pada *Self orientation*. Hal ini termanifestasi pada motivasi istri menjadi BMPI. Secara mayoritas keputusan menjadi BMPI tidak didasarkan atas kehendak istri dan demi kepentingan diri sendiri, namun didasarkan atas kepentingan *collective* (keluarga BMPI) untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pola tindakan *collective orientation* ini lanjut menjadi salah satu modal dalam menjaga integrasi keluarga.

## 3. *Universal versus particularize*

Pada penelitian ini pola hubungan *universal* lebih dominan dari pada *particularize*. Hal ini ditandai dengan pola tindakan *actors* yang didasarkan atas nilai maupun norma yang bersifat universal atau umum. Diantaranya nilai mengenai pentingnya keluarga, nilai sakral pernikahan dan nilai mengenai perceraian. Lebih lanjut nilai maupun norma yang bersifat universal pada masyarakat Desa Watulimo tersebut berlaku pada seluruh masyarakat termasuk keluarga BMPI, kemudian menjadi dasar dan mengatur *actors* dalam menjaga integrasi keluarga. Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada sub analisis *latent pattern maintenance*.

## 4. *Specificity versus diffusnes*

Pola hubungan *diffusnes* terjadi dimana semua orang misalnya dalam keluarga saling berinteraksi dan tidak didasarkan atas status tertentu. Sedangkan pola hubungan *specificity* hanya bersifat terbatas, misalnya penjual dan pelanggan yang didasarkan atas jual beli (Poloma, 2000). Berdasarkan gambaran tersebut maka pada penelitian ini pola hubungan *diffusnes* lebih dominan terjadi khususnya antara anggota keluarga BMPI. Meskipun komunikasi antara ayah ibu dan ibu dengan anak selama ibu menjadi BMPI sangat terbatas, namun pola interaksi yang terbangun lebih berorientasi pada kekeluargaan dan *diffusnes*.

Pada konteks *voluntaristic theory of action* dan teori sistem parson, pola-pola di atas direduksi dari pola-pola nilai selanjutnya dilembagakan dan secara umum diterapkan oleh *actors*. Pola tindakan yang dilembagakan *actors* sebagai hasil reduksi nilai, pada keluarga BMPI memiliki kontribusi dalam upaya menjaga integrasi keluarga. Selanjutnya kecenderungan keluarga sebagai sistem dalam menjaga kondisi orde dan harmonis, diidentifikasi dan dianalisis melalui syarat fungsi sistem teori Parsons. Adapun syarat fungsi sistem tersebut yakni *adaptation* (adaptasi), *goal* (tujuan), *integration* (integrasi) dan *latent pattern-maintenance* (latensi).

## 1. *Adaptation*: kesinambungan tindakan dalam perubahan pembagian kerja

*Adaptation* merupakan upaya *actor* mengambil fasilitas yang cukup dari alam sekeliling dan membaginya melalui sistem (Soekanto, 1986, hlm. 43). Pada konteks penelitian ini *adaptation* merujuk pada kemampuan keluarga sebagai sistem, menjamin kebutuhan seluruh bagian sub sistem atau anggota keluarga. Jadi keluarga sebagai sistem secara normatif harus mampu memenuhi kebutuhan dari seluruh anggota keluarga, terutama kebutuhan materi. Keluarga BMPI (informan) dalam memenuhi kebutuhan materi mereka memanfaatkan berbagai sumber daya. Hal tersebut termanifestasi pada mekanisme pembagian kerja antara suami istri. Pembagian kerja terbagi menjadi dua kondisi yakni:

a) *Adaptation*: Pembagian kerja ketika istri belum menjadi BMPI.

Sebelum istri menjadi BMPI mayoritas suami lebih dominan menjalankan *adaptation* dibanding istri. Suami cenderung menjadi tulang punggung keluarga untuk mendapatkan penghasilan. Adapun pekerjaan yang mereka tekuni adalah sebagai petani, sopir tukang kayu maupun pekerjaan srabutan. Bersamaan itu istri menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai ibu rumah tangga di rumah, melakukan pekerjaan domesik yang bersifat reproduktif.

Pembagian kerja di atas merepresentasikan nilai bias gender yang teresternalisasi pada informan. Masyarakat memiliki “aturan” bahwa lazimnya istri dominan melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah masing-masing, sedangkan laki-laki dominan bekerja di luar rumah. Jadi antara suami istri cenderung kurang memiliki kesempatan dalam melakukan pekerjaan pasangan.

Pada konteks teori sistem Parsons, pembagian kerja dalam keluarga informan yang didasarkan pada nilai bias gender merupakan manifestasi *latent pattern-maintenance*. Jadi *adaptation* memiliki keterkaitan dengan *latent pattern-maintenance*. Lebih lanjut pembagian kerja pada masing-masing keluarga memiliki variasi tertentu. Dalam artian terdapat tarik ulur suami dan istri dalam menjalankan peran pasangan. Hal tersebut sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:



**Tabel 2. Jenis pekerjaan dan variasi keterlibatan suami istri dalam pekerjaan pasangan ketika istri belum menjadi BMPI.**

No	Nama		Pekerjaan		Keterangan
	Suami	Istri	Suami	Istri	
1	Tataq	Iin	Srabutan	Guru honorer	Suami istri terlibat dalam pekerjaan publik maupun domestik
2	Aan	Titin	Petani	Ibu rumah tangga	Suami istri terlibat dalam pekerjaan publik maupun domestik
3	Udik	Titik	Petani, sopir	Ibu rumah tangga	Suami tidak terlibat pada pekerjaan domestik, sebaliknya istri terlibat pada pekerjaan publik
4	Tono	Teni	Petani	Ibu rumah tangga	Suami terlibat pada pekerjaan domestik, sebaliknya istri tidak terlibat pada pekerjaan publik
5	Totok	Yayah	Petani	Ibu rumah tangga	Suami terlibat pada pekerjaan domestik, sebaliknya istri tidak terlibat pada pekerjaan publik
6	Muski	Arki	Petani, tukang kayu	Ibu rumah tangga	Suami istri terlibat dalam pekerjaan publik maupun domestik
7	Parni	Anti	Petani	Ibu rumah tangga	Suami istri terlibat dalam pekerjaan publik maupun domestik

*Sumber:* Data Olahan Peneliti, 2014

Pada penelitian ini *adaptation* yang hanya dominan diperankan oleh suami belum sepenuhnya berjalan maksimal. *Goal* keluarga yakni pemenuhan kebutuhan materi belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut disebabkan karena minimnya kepemilikan aset disamping aset tersebut belum dikelola secara maksimal.

Serangkaian penjelasan di atas menggambarkan *adaptation* yang hanya dominan diperankan suami justru kurang maksimal, sehingga *goal* belum tercapai. Selanjutnya istri berupaya melakukan penyesuaian diri untuk lebih terlibat dalam mencari nafkah. Hal itu diiringi dengan nilai bias gender pada kondisi tertentu bersifat longgar, perlahan mengarah pada kesetaraan. Jadi suami istri menjadi lebih berpeluang untuk terlibat aktif dalam mencari nafkah. Istri kemudian terlibat aktif mencari nafkah dengan menjadi BMPI dalam kurun waktu tertentu. Ketika istri menjadi BMPI kemudian terjadi pergeseran *adaptation*.

b) *Adaptation* : Pembagian kerja ketika istri menjadi BMPI.

Pembagian kerja antara suami istri ketika istri menjadi BMPI merupakan bagian dari *adaptation*. Pada kondisi ini suami istri berusaha memanfaatkan sumber daya untuk mendapatkan materi. *Adaptation* menjadi lebih maksimal ketika istri menjadi BMPI. Dengan remitansi informan mengalami perbaikan struktur ekonomi. Mereka mampu memperbanyak aset ekonomi; membeli lahan pertanian, perkebunan maupun pekarangan. Jadi ketika istri menjadi BMPI fungsi ekonomi keluarga juga meningkat.

Pada konteks budaya Jawa *adaptation* di atas menunjukkan semakin melongarnya nilai bias gender menjadi lebih seimbang. Pembagian kerja menjadi tidak bersifat *sexist*. Remitansi perbulan istri yang lebih tinggi dari penghasilan suami, seolah-olah menjadikan istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.

Pergeseran pembagian kerja yang bersifat *sexist* menjadi setara, tanpa diimbangi dengan melongarnya nilai bias gender maupun patriarkhi dalam lingkup masyarakat maupun keluarga, sesungguhnya akan menimbulkan ketidak setabilan kesatuan keluarga. Ketika istri menjadi BMPI dan pembagian kerja dalam keluarga menjadi setara, sedangkan budaya pada masyarakat dominan bersifat *sexist* maka sangat memungkinkan suami akan mengalami gejolak secara psikologis. Ia akan merasa eksistensinya dalam menjalankan peran sebagai suami sebagaimana “tuntutan” budaya yang ada dalam masyarakat mengalami penurunan. Hal tersebut dapat mengganggu hubungan harmonis antara suami istri ketika istri menjadi BMPI, akhirnya keutuhan keluarga menjadi terganggu. Analisis ini sebagaimana temuan penelitian Dauly (2001) bahwa faktor psikologis di mana suami berpandangan bahwa peranannya menjadi berkurang terutama dalam mencari nafkah ketika istri menjadi BMPI,

menjadi nomor dua penyebab utama perceraian keluarga BMPI di Kecamatan Rawamarta Kabupaten Karawang.

Pada penelitian ini peneliti tidak menemukan sebagaimana temuan Daulay tersebut. Ketika istri menjadi BMPI pembagian kerja menjadi sangat fleksibel, begitu juga pada masyarakat. Jadi gejala psikologis suami yang menyebabkan perceraian sebagaimana temuan Daulay juga tidak tampak, hanya saja ketika suami menggantikan pekerjaan istri pada poin tertentu adakalanya mereka mengalami kesulitan namun akhirnya hal tersebut dapat diatasi.

Rangkaian penjelasan di atas berdasarkan teori sistem Parsons terlihat bagaimana bekerjanya *adaptation*. *Adaptation* selanjutnya memiliki hubungan interdependensi dengan *latent pattern-maintenance*. Ketika istri menjadi BMPI maka hal itu menunjukkan pergeseran atau melemahnya nilai bias gender yang menjadi dasar motivasi keluarga BMPI dalam melakukan pembagian kerja. Ketika istri sebelum menjadi BMPI umumnya pembagian kerja lebih dominan bersifat *sexist*, kemudian ketika istri menjadi BMPI pembagian kerja menjadi setara bahkan suami menggantikan istri dalam melakukan pekerjaan domestik.

*Latent pattern-maintenance* yang termanifestasi pada dasar motivasi pembagian kerja yang setara antara suami istri atas melonggarnya nilai bias gender selanjutnya mengarah pada *integration*. Hal itu termanifestasi pada kesesuaian tindakan yang terjadi antara suami istri. Di mana terjadi koordinasi antara suami istri, ketika istri meninggalkan peran domestik untuk membantu suami mencari nafkah kemudian suami mengisi peran domestik istri yang sedang ditinggalkan. Melalui koordinasi tersebut kesatuan keluarga antara suami istri dapat berjalan.

*Integration* di atas akhirnya juga mencakup koordinasi antara suami istri dalam mengelola remitansi. Posisi suami yang menggantikan peran istri pada ranah domestik, secara umum juga diiringi dengan managerial keuangan keluarga yang sebelumnya diperankan istri menjadi diambil alih oleh suami. Bekerjanya *integration* akhirnya menjadi salah satu jalan informan untuk mencapai *goal attainment*.

## **2. Goal Attainment: Kerja sama dalam mencapai tujuan atas keputusan menjadi BMPI**

Pada konteks penelitian ini *goal attainment*<sup>2</sup> merujuk pada tujuan keluarga terkait dengan keputusan menjadi BMPI, yakni ingin mencapai kesejahteraan ekonomi. Mereka merinci ingin memiliki sejumlah tabungan sebagai persiapan sekolah anak, uang untuk modal usaha, membangun rumah, memperbaiki rumah, membeli kebun, sawah, ladang atau *alas*.

---

<sup>2</sup> *Goal attainment* yakni memprasyaratkan tujuan sistem dan penetapan prioritas di antara tujuan-tujuan (Soekanto, 1986, hlm. 43).

Bersamaan dengan hal itu mereka berusaha mempertahankan kesatuan dan kondisi harmonis keluarga.

Dari tujuan di atas selanjutnya terdapat upaya untuk mewujudkan masing-masing tujuan. Mereka saling kerja sama antara suami istri. Ketika istri telah mendapatkan remitansi perbulan setelah masa potong gaji, sebagian besar informan menceritakan kalau gaji tersebut sebagian besar dikirimkan suami untuk dikelola.

Selanjutnya dalam mengelola remitansi, suami menabungkan remitansi tersebut di bank, membeli lahan produktif diantaranya: sawah, pekarangan, kebun cengkih maupun kebun kelapa, membangun atau memperbaiki rumah dll. Sebagian kecil suami BMPI menggunakan remitansi sebagai modal usaha dan bergabung dengan asuransi beasiswa. Mereka juga menggunakan remitansi sebagai uang konsumsi sehari-hari namun tidak lebih dari 20 persen.

Berdasarkan penjelasan di atas “eksekutor” *goal attainment* justru dominan diperankan oleh suami. *Management* remitansi yang dijalankan suami sangat menentukan tercapainya *goal*. Pada penelitian Daulay (2001) *menagement* remitansi menjadi hal sensitif. Suami adakalanya menghambur-hamburkan remitansi pada hal-hal yang tidak produktif. Daulay (2001) juga mencatat penggunaan remitansi yang dikirim kepada suami menduduki posisi ke tiga sebagai penyebab perceraian keluarga BMPI.

Berdasarkan temuan di atas menunjukkan, kerja sama antara suami istri dan sejauh mana mereka menjaga kepercayaan pasangan dalam mencapai *goal* sangat mempengaruhi kondisi harmonis keluarga. Akan tetapi temuan tersebut tidak terjadi pada penelitian ini. Seluruh informan mengaku bahwa pengelolaan remitansi diserahkan sepenuhnya kepada suami. Selanjutnya suami sangat berhati-hati dalam menjaga kepercayaan istri serta mengalokasikan remitansi sebagaimana kesepakatan bersama.

Berdasarkan teori sistem Parsons menunjukkan bahwa pada *goal attainment* terdapat prioritas utama yang ingin dicapai, misalnya ingin memiliki aset-aset pertanian. *Goal attainment* selanjutnya memiliki hubungan interdependensi dengan *integration*. Keberhasilan dalam mencapai *goal* sangat dipengaruhi oleh kerjasama antara suami istri dalam mengelola remitansi.

Lebih lanjut hubungan interdependensi di atas juga memiliki hubungan interdependensi dengan *latent pattern-maintenance*. Ketika suami istri melakukan kerja sama dalam pengelola remitansi. Hal tersebut merepresentasikan nilai bias gender menuju ke arah yang setara. Secara umum laki-laki dan perempuan memiliki stereotip masing-masing sebagai hasil dari konstruksi budaya. Laki-laki dianggap memiliki sifat rasional dan perkasa sedangkan

perempuan jeli dan teliti. Konsekuensinya secara normatif istri lebih tepat sebagai pengelola remitansi. Selanjutnya setelah stereotip tersebut melebur suami dituntut dan menjadi “leluasa” melakukan peran yang sebelumnya dominan menjadi ranah perempuan termasuk dalam mengelola remitansi. Sehingga suami dapat lebih maksimal dalam berusaha mencapai tujuan keluarga.

### **3. Integration: Koordinasi antara suami istri ketika muncul permasalahan**

Pada penelitian ini *integration* merujuk pada pemeliharaan hubungan antara suami istri (informan). Ketika istri menjadi BMPI muncul risiko yang dapat mengganggu hubungan harmonis antara suami istri, diantaranya: muncul salah faham antara suami istri saat istri menjadi BMPI, muncul rasa curiga atas keberadaan WIL (Wanita idaman lain) atau PIL (Pria idaman lain), terjadi pertengkaran antara suami istri karena berbagai sebab. Ketika menghadapi masalah tersebut mereka mengakui sesaat rasa emosi muncul namun lebih lanjut mereka berusaha melakukan koordinasi menekan keberlanjutan masalah tersebut. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk menjaga integrasi keluarga.

Selain masalah di atas salah satu informan menghadapi masalah atas munculnya keberadaan WIL dari pihak suami. Menanggapi masalah tersebut istri berusaha untuk mengingatkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai pentingnya keluarga dan mengancam integrasi keluarga. Hingga pada akhirnya suami menyudahi dan kembali ke “jalan yang benar”.

Berdasarkan Teori sistem Parsons kondisi di atas merepresentasikan bekerjanya *integration*. Informan berusaha melakukan koordinasi untuk menjaga hubungan harmonis. Lebih lanjut hal tersebut memiliki hubungan interdependensi dengan *latten pattern maintenance*. Di mana *integration* didasari oleh nilai atau norma yakni nilai pentingnya keluarga dan perceraian. Selanjutnya ketika hubungan antara suami istri harmonis maka mekanisme pembagian kerja sekaligus kerja sama dalam mengelola remitansi akan berjalan maksimal. Pada akhirnya *goal* keluarga dapat tercapai.

### **4. Latent patern maintenance: Kesesuaian tindakan suami istri dengan seperangkat nilai dan norma dalam menjaga integrasi keluarga.**

Pada penelitian ini *latent pattern-maintenance* mengarah pada kesesuaian tindakan informan dengan berbagai aturan atau norma. Pada tataran abstrak norma berupa nilai yang dapat mengontrol keluarga BMPI dalam mempertahankan kesatuan keluarga. Nilai-nilai tersebut diantaranya;

1. Nilai sakral suatu perkawinan dalam adat masyarakat Desa Watulimo dan ajaran agama islam.

Berdasarkan adat setempat nilai sakral perkawinan termanifestasi pada penentuan hari pernikahan, prosesi pernikahan maupun penentuan pasangan ideal. Dari hal sakral tersebut seolah-olah mengatur informan untuk menjaga kelanggengan pernikahan. Selanjutnya nilai sakral pernikahan dan berdasarkan ajaran agama islam bahwa terdapat beberapa hukum mengenai pernikahan dan perkawinan. Hukum secara sederhana dapat dikatakan sebagai aturan, secara sosilogis diistilahkan sebagai norma. Adapun norma pernikahan tersebut adalah:

1. Sunah, yakni jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa (Hasan, 2011, hlm. 11). Hukum pernikahan termasuk sunah jika orang yang hendak menikah menginginkan punya anak atau keturunan tapi dia mampu mengendalikan diri dari berbuat zina (Anonymous, 1474 H.; hlm.1).
2. Wajib, yakni sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan justru mendapatkan dosa (Hasan, 2011, hlm. 11). Hukum pernikahan termasuk wajib jika orang yang hendak menikah telah mampu memenuhi syarat nikah dan jika tidak segera menikah dikhawatirkan terjerumus ke perbuatan zina (Anonymous, 1474 H, hlm. 1).
3. Haram, yakni sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan dosa dan jika tidak dikerjakan justru mendapatkan pahala (Hasan, 2011, hlm. 11). Hukum pernikahan termasuk haram jika, ia menikah justru akan merugikan istrinya karena tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin. (Anonymous, 1474 H, hlm. 1).
4. Makruh, yakni sesuatu yang jika dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala (Hasan, 2011:11). Hukum pernikahan termasuk makuh jika, orang yang hendak menikah sebenarnya belum berminat menikah dan memiliki anak dan ia juga mampu menahan diri dari berbuat zina (Anonymous, 1474 H, hlm. 1).
5. Mubah, yakni sesuatu yang boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan, Jika dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa (Hasan, 2011, hlm.

11). Hukum pernikahan termasuk mubah jika orang yang hendak menikah mampu menahan diri dari berbuat zina dan belum berminat memiliki keturunan (Anonymous, 1474 H, hlm. 1).

Berdasarkan tingkatan norma pernikahan dan perkawinan menunjukkan bahwa norma agama islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah. Substansi pernikahan yang pada dasarnya merupakan suatu ibadah bahkan bisa menjadi dosa. Kemudian terdapat konsekuensi bahwa perbuatan yang berusaha melanggengkan pernikahan tersebut dianggap sebagai perbuatan suci atau ibadah.

Kedua nilai sakral baik hukum adat setempat maupun hukum islam di atas beroperasi pada diri informan. Selanjutnya informan sangat memegang teguh dari konsekuensi nilai tersebut, yakni berusaha semaksimal mungkin untuk melanggengkan suatu pernikahan. Secara praktik hal itu termanifestasi pada upayanya untuk tetap melanggengkan suatu pernikahan, diantaranya tampak pada motivasi istri menjadi BMPI.

Menjadi BMPI merupakan salah satu cara istri untuk menopang ekonomi keluarga. Ekonomi atau materi merupakan salah satu bagian yang sangat menentukan keberlangsungan suatu keluarga. Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami krisis, kemudian tanpa diikuti upaya yang kompak antara suami istri untuk keluar dari kondisi tersebut, maka harmonisasi keluarga akan terganggu. Selanjutnya ketika harmonisasi keluarga terganggu maka beresiko terjadi perceraian, sehingga bertolak belakang dengan nilai sakral suatu pernikahan dan perkawinan.

Penjelasan di atas merupakan manifestasi *latent pattern-maintenance* yang terimplisit dalam keputusan istri menjadi BMPI. Selanjutnya hal tersebut mengarah pada *integration*. Istri berusaha menjaga kelanggengan pernikahan yang beresiko terancam karena masalah ekonomi dan mem-*back up* peran suami dalam mencari nafkah.

Nilai sakral suatu pernikahan juga bekerja pada diri istri ketika ia menjadi BMPI. Padahal kontrol sosial untuk melanggengkan suatu pernikahan dan perkawinan melemah karena terdapat perbedaan *setting* sosial. Meskipun demikian tindakan BMPI masih konsisten dalam menjaga kelanggengan suatu pernikahan dan berusaha menghindari tindakan yang dapat mengganggu hubungan harmonis antara suami istri. Misalnya ketika *holiday*, sesungguhnya BMPI memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal baru, mengenal seseorang yang berpeluang menjadi pihak ke tiga. Namun mereka sangat membatasi hal-hal tersebut, sebagian besar waktu *holiday* justru digunakan untuk melakukan yasin tahlil atau sekedar berkumpul di taman dengan sesama BMPI. Bersamaan dengan hal ini suami BMPI juga berusaha menjaga kelanggengan pernikahan. Ketika istri menjadi BMPI ia juga berusaha

menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengganggu hubungan harmonis antara suami istri. Kondisi tersebut secara tidak langsung merepresentasikan berkerjanya nilai sakral dari suatu perkawinan dan pernikahan pada suami.

Berdasarkan teori sistem Parsons diketahui bahwa terdapat *latent pattern-maintenance* pada keluarga BMPI. Hal tersebut ditandai dengan bekerjanya nilai sakral pernikahan dan perkawinan yang termanifestasi pada upaya suami istri dalam melanggengkan pernikahan dan perkawinan, di tengah kondisi yang retan memunculkan ketidak stabilan kesatuan keluarga. *Latent pattern-maintenance* tersebut selanjutnya mengarah pada *integration*. Di mana terdapat kesesuaian tindakan antara suami istri. Mereka berusaha saling melakukan tindakan koordinatif saling menjaga diri demi kelanggengan pernikahan dan perkawinan. Jadi bekerjanya *latent pattern-maintenance* pada *case* nilai sakral pernikahan dan perkawinan memiliki hubungan interdependensi dengan *integration*.

6. Nilai mengenai pentingnya keluarga dan nilai perceraian.

Nilai pentingnya keluarga sekaligus nilai perceraian juga beroperasi pada diri informan. Esensi dari nilai pentingnya keluarga mengarah pada pentingnya keluarga bagi anggota keluarga terutama bagi anak. Nilai tersebut lebih tampak ketika dihadapkan dengan perceraian. Informan secara mayoritas menolak suatu perceraian yang menjadi tanda utama dari suatu disintegrasi keluarga, sekaligus menandakan rusaknya suatu sistem keluarga yang secara normatif sebagai naungan bagi anggota keluarga.

Nilai mengenai pentingnya keluarga kemudian semakin kuat ketika dihadapkan dengan substansi perceraian dan nilai suatu perceraian. Informan menghindari perceraian karena substansi dari perceraian tersebut. Menurut mereka perceraian merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan terutama bagi anak.

Selain hal di atas informan juga telah terinternalisasi mengenai nilai perceraian. Nilai tersebut terbagi menjadi dua yakni: 1) nilai mengenai perceraian yang diproduksi oleh masyarakat. Dimana perceraian merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan secara umum akan menerima sanksi negatif dari masyarakat setempat, berupa gunjingan maupun cemo'ohan. 2) nilai mengenai perceraian yang diproduksi oleh ajaran agama islam bahwa meskipun perceraian diperbolehkan namun merupakan hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Sebagian besar informan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai salah satu dasar dalam melanggengkan pernikahan atau menjaga integrasi keluarga.

Nilai pentingnya keluarga dan nilai perceraian yang termanifestasi pada upaya informan menjaga keutuhan keluarga, secara konkrit tampak pada pemikiran informan ketika ditanya mengenai perceraian. Bagi mereka jika suami istri bercerai berai, maka akan timbul



dampak negatif bagi anak dan keluarga. Kemudian berdasarkan pemikiran tersebut informan (pasangan suami istri BMPI) berusaha untuk selalu menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian.

Pada konteks teori sistem Parsons penjelasan di atas merupakan *latent pattern-maintenance*. Dimana upaya dalam menjaga kesatuan keluarga, didasarkan pada nilai mengenai pentingnya keluarga dan perceraian. *Latent pattern-maintenance*, secara konkrit tidak akan terwujud tanpa adanya tindakan koordinatif antara suami istri dalam menjaga hubungan yang harmonis. Koordinasi ini merupakan salah satu hal utama yang menopang berjalannya sistem keluarga. Dengan kata lain dalam *latent pattern-maintenance* ditopang oleh *integration*.

Berbagai penjelasan dan analisis di atas merupakan bekerjanya syarat-syarat penopang sistem berdasarkan perspektif Parsons, pada *case* integrasi keluarga BMPI. Bekerjanya *adaptation*, *goal*, *integration* dan *latent pattern-maintenance* memiliki hubungan interdependensi satu sama lain sebagaimana dijelaskan pada bagan teori sistem bab empat. Melalui berjalannya empat syarat fungsi sistem di atas dapat diketahui bahwa, terdapat nilai-nilai tertentu yang mempengaruhi informan untuk tetap menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam bekerjanya *latent pattern-maintenance*. Lebih lanjut *latent pattern-maintenance* memiliki hubungan interdependensi dengan syarat fungsi sistem yang lain; *goal*, *integration* dan *adaptation*. Dari serangkaian syarat fungsi sistem di atas pada akhirnya tujuan keluarga BMPI dan integrasi keluarga dapat terealisasi.

## **F. KESIMPULAN**

Empat aspek upaya keluarga BMPI dalam menjaga integrasi keluarga merupakan manifestasi syarat berjalannya sistem keluarga yakni: 1) Kesenambungan tindakan dalam perubahan pembagian kerja merepresentasikan *adaptation*. 2) Kerja sama dalam mencapai tujuan atas keputusan menjadi BMPI merepresentasikan *goal attainment*. 3) Koordinasi antara suami istri ketika muncul permasalahan merepresentasikan *integration*. 4) Kesesuaian tindakan suami istri dengan seperangkat nilai dan norma dalam menjaga integrasi keluarga merepresentasikan *latent pattern maintenance*. Bagian-bagian tersebut memiliki hubungan interdependensi dan dijalankan oleh sub sistem (anggota keluarga BMPI). Bekerjanya bagian-bagian tersebut akan menopang keluarga BMPI dalam menjaga integrasi keluarga.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Anonymous. (1474 H). *Qurrotul 'uyun*. Diterjemahkan oleh KH Misbah MustafaAsy'ari Mahmud (ed). Rembang: Al-Balagh.
- Daulay, H. (2001). *Pergeseran pola relasi gender di keluarga migran: Studi kasus TKIW di Kecamatan Rawamarta Kab. Karawang Jawa Barat*. Lies Marcoes-Natsir (ed). Yogyakarta: Galang Press.
- Goelardi, S. T (2004). Perubahan nilai di kalangan wanita yang bercerai. Dalam T.O Ihromi (ed). *Sosiologi keluarga*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Hasan, M. (2011). *Panduan shalat lengkap*. Yogyakarta: Mutiara Media
- Horton, B. P & Chester L. H. (1996). *Sociology*. Diterjemahkan oleh Aminuddin Ram dan Titi Sobari. Herman Sinaga (ed). Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudjijono dkk. (1998). *Fugsi keluarga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Author.
- Poloma, M. (2000). *Contemporary sociological theory*. Diterjemahkan oleh tim penerjemah Yasagama. Jakarta: RajaGravindo.
- Prameswari, E. (2004). Peranan keluarga dalam pendidikan taruna di akademi TNI-AL (ALL). T.O Ihromi (ed). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Salim, A. (2006). *Teori paradigma penelitian sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soekanto, S. (1986). *Fungsionalisme imperatif*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2001). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2012). *Case Study Research Design and Methods*. Diterjemahkan oleh. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zeitlin, I. M. (1998). *Rethinking Sociology : a Critique Contemporary Theory* diterjemahkan oleh. Anshori dan Juhanda. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

### Skripsi:

- Sofiasta, A. (2010). *Kebutuhan seksual sebagai penyebab utama tingginya angka Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi* (Skripsi). Diakses pada 16 November 2013, dari [http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th\\_detail&id=05210041](http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=05210041)

### Jurnal on line:

- Yunitasari, W. *Perubahan fungsi keluarga Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek*. *Jurnal Online UMM*, (01-01). Diakses 10 November 2013, dari <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel92BB2848742B390CAF6F6C8A348EA85A.pdf>.

### Dokumen Pemerintah:

- Pemerintah Kecamatan Watulimo. (2011). *Arsip Kecamatan Watulimo: Daftar TKI Tahun 2011*. Trenggalek: Penyusun.
- Pemerintah Kecamatan Watulimo. (2012). *Arsip Kecamatan Watulimo: Daftar TKI Tahun 2011*. Trenggalek: Penyusun.
- Pemerintah Kecamatan Watulimo. (2013). *Arsip Kecamatan Watulimo: Daftar TKI Tahun 2011*. Trenggalek: Penyusun.

**Dokumen Pemerintah dari Database:**

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). (2012). Penempatan Berdasar Daerah Asal (Kota/Kabupaten) 2011-2012. Diakses pada 12 Juni 2012 dari <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-penempatan/6779-penempatan-berdasar-daerah-asal-kotakabupaten-2011-2012.html>
- Pengadilan Agama Trenggalek. (2011). Pekerjaan Pihak Berperkara Pada Pengadilan Agama Trenggalek. Diakses pada 24 November 2013 dari [http://perkara.net/v1/?c\\_pa=pa.tl](http://perkara.net/v1/?c_pa=pa.tl).
- Pengadilan Agama Trenggalek. (2012). Pekerjaan Pihak Berperkara Pada Pengadilan Agama Trenggalek. Diakses pada 24 November 2013 dari [http://perkara.net/v1/?c\\_pa=pa.tl](http://perkara.net/v1/?c_pa=pa.tl).
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. (2011). Diakses tanggal 27 Oktober 2013 dari [http://perkara.pta-surabaya.go.id/v1/action/RekapWilayah.php?c\\_pa=pa.tl](http://perkara.pta-surabaya.go.id/v1/action/RekapWilayah.php?c_pa=pa.tl)
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. (2013). 27 Oktober 2013 dari [http://perkara.pta-surabaya.go.id/v1/action/RekapWilayah.php?c\\_pa=pa.tl](http://perkara.pta-surabaya.go.id/v1/action/RekapWilayah.php?c_pa=pa.tl)

## Biografi Penulis

**Ari Maya Sopa** lahir pada tanggal 28 Januari 1991 Putri kedua dari Bapak Suyatmo dan Ibu Suwarti. Saat ini telah menyelesaikan masa studi yang diawali dari SDN 2 Karanggandu lulus pada tahun 2003, berlanjut di MTsN Watulimo lulus pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2009 lulus dari MAN I Tulungagung. Sebelum melanjutkan pendidikan di Universitas Penulis menempuh pendidikan non formal di BEC Pare Kediri angkatan TC 106. Selanjutnya pada tahun 2010 penulis menjadi mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya Malang dan berhasil memperoleh gelar sarjana pada tahun 2014.

Keterlibatan penulis di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan antara lain: 1) Praktikum penelitian Mata Kuliah Sosiologi Pedesaan “Peran Organisasi Kelompok Tani dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar (2011); 2) Praktikum penelitian Mata Kuliah Kemiskinan di Negara Ketiga “Aksesibilitas Infrastruktur Kesehatan dan Kemiskinan” (Studi Tingkat Gizi dan Kesehatan Balita, Ibu Hamil Menyusui dan Anak di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu) (2012); 3) Praktikum penelitian Mata Kuliah Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi “Kajian Sosiologi Konflik Trayek Sopir Angkot Batu-Landungsari Dengan Sopir Bus Puspa Indah di Jalur Malang-Batu Serta Upaya dalam Mencapai Rekonsiliasi) (2012); 4) Praktikum penelitian Mata Kuliah Desentralisasi/ Otonomi Daerah “Musrenbangdes Sebagai Media Realisasi Demokrasi Deliberatif Pada Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus pada Pembangunan Desa Wisata Bumiaji Kota Batu)” (2013); 5) Laporan Kuliah Kerja Nyata di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo “Pemberdayaan Komunitas Anak Putus Sekolah Dan Ibu Rumah Tangga Miskin Melalui Produksi olahan makanan *Nugget* Ikan Dan *Nugget* Pisang Berbasis Potensi Lokal” (2013); 4) Skripsi “Upaya keluarga BMPI dalam menjaga integrasi keluarga di Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupateng Trenggalek” (2014); 5) Terlibat sebagai enumerator penelitian Laboratorium Sosiologi mengenai “Praktik Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Pada Masyarakat (Studi di Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)” (2014); 5) Asisten Praktikum (Tutor) Mata Kuliah Metode Kuantitatif Tahun 2013 semester ganjil dan 2014 semester ganjil.

*Contact Person:* 081945947081

*Email:* arimayasopa@gmail.com